

KETERGANTUNGAN AUSTRALIA DI BIDANG PERTAHANAN

Australia's Dependence on Defence

Rio Kevin

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
Depok, Indonesia
rio.kevin@ui.ac.id

Evi Fitriani

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Indonesia
Depok, Indonesia
evi.fitriani09@ui.ac.id

*Corresponding Author: rio.kevin@ui.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

24 January 2025

Revised

21 February 2025

Accepted

22 February 2025

Keywords:

alliance; Australia;
defence dependency;
security dilemma;
strategic calculation.

Kata kunci:

aliansi; Australia;
ketergantungan
pertahanan; dilema
keamanan; kalkulasi
strategis.

Abstract

This study aims to explore how a country determines its defense policy. It employs the concepts of the security dilemma and alliances to analyze qualitative data gathered from a literature review. Since its founding in 1901, Australia has benefitted from its alliances, which have provided a sense of security. However, these alliances also come with costs, one of which is the obligation to support the strategic interests of partner nations. Australia has been willing to bear the costs associated with its partnerships with the United States and the United Kingdom. This willingness has persisted from the country's inception to the present day, culminating in Australia's participation in the Australia, United Kingdom, and United States (AUKUS) agreement. Our findings indicate that Australia is so eager for the security provided by its alliances with the United States and the United Kingdom that it is prepared to accept the high costs of membership. Ultimately, Australia's strategic calculations significantly influence its strategic culture.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana suatu negara menentukan kebijakan pertahanannya. Studi ini menggunakan konsep dilema keamanan dan aliansi untuk menganalisis data kualitatif yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka. Sejak didirikan pada tahun 1901, Australia telah memperoleh manfaat dari aliansinya, yang telah memberikan rasa aman. Namun, aliansi ini juga disertai dengan biaya, salah satunya adalah kewajiban untuk mendukung kepentingan strategis negara mitra. Australia bersedia menanggung biaya yang terkait dengan kemitraannya dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya. Ketersediaan ini telah berlanjut sejak negara itu berdiri hingga saat ini, yang berpuncak pada partisipasi Australia dalam perjanjian Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat (AUKUS). Temuan kami menunjukkan bahwa Australia sangat menginginkan keamanan yang diberikan oleh aliansinya dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya sehingga siap menerima biaya keanggotaan yang tinggi. Pada akhirnya, kalkulasi strategis Australia secara signifikan memengaruhi budaya strategisnya.

PENDAHULUAN

Dalam sistem internasional yang anarki, negara akan selalu khawatir atas intensi dari negara lain, serta merasakan ketidakpastian akan keamanannya. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, negara mempunyai dua pilihan, pertama memperkuat kapasitas pertahanannya (*internal balancing*), kedua bekerja sama dengan negara lain terutama yang lebih kuat (*external balancing*). Kebijakan kedua umumnya diambil oleh negara berkekuatan menengah (*middle power*¹) dan kecil (*small power*) yang tidak memiliki kapasitas mumpuni untuk mempertahankan wilayahnya. Namun sebagai anggota aliansi, terdapat harga yang harus dibayar oleh negara menengah atau kecil tersebut, yang biasanya dibandingkan dengan keuntungan keamanan yang didapatkan.

Australia adalah salah satu negara yang sejak terbentuk 1 Januari 1901 sudah memiliki kecenderungan untuk beraliansi, mengingat negara ini merupakan bekas koloni Inggris (*Penal Colony*) Inggris. Dibentuk oleh sejarahnya, Australia memiliki kecenderungan untuk memastikan keamanannya melalui aliansi dengan Inggris atau Amerika Serikat (AS). Terdapat masa

ketika Australia berusaha untuk membangun pertahanan yang lebih mandiri, tetapi usaha ini gagal, sehingga Australia kembali bergantung pada aliansi. Sejarah pertahanan Australia membentuk evolusi yang menarik untuk mengkaji bagaimana suatu negara mempertimbangkan keuntungan dan ongkos dalam beraliansi. Memenuhi biaya dari sebuah aliansi memerlukan komitmen yang besar, baik dari segi sumber daya maupun kedaulatan. Sejarah memperlihatkan bahwa Australia lebih memilih untuk menanggung biaya tersebut.

Karena keanggotaannya dalam berbagai aliansi dengan Inggris dan AS, Australia banyak menghabiskan sumber daya untuk mendukung perang dan konflik yang melibatkan kedua negara tersebut. Sebagai negara berdaulat, Australia dapat mengalokasikan sumber daya miliknya untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya. Namun, Australia lebih memprioritaskan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mendukung kepentingan strategis kedua mitranya. Bahkan, kedaulatan Australia untuk mengalokasikan sumber dayanya pada stabilitas dan keamanan di lingkungannya sendiri dapat dialihkan demi kepentingan aliansi sebagai kewajiban

¹ Istilah *middle power* digunakan untuk menggambarkan sebuah negara yang tidak masuk

dalam kategori *great power* maupun *small power*. Lihat Wood (1987, 3-4).

anggota aliansi, sebagaimana yang terjadi dalam Australia, New Zealand, United States (ANZUS).

Kebutuhan Australia akan aliansi juga dapat dipertanyakan jika melihat pada lingkungan strategisnya. Tidak seperti Eropa dan Asia yang sering menjadi mandala pertempuran global, posisi Australia terpencil sehingga membuat negara ini relatif aman dari ancaman pihak lain. Wilayah teritorialnya yang luas dan memiliki perlindungan natural juga menyulitkan pihak lain untuk melakukan penyerangan ke wilayah Australia (Bisley, 2016). Selain itu, kawasan Oceania, tempat Australia berada, juga relatif aman, hanya terdiri atas negara berkekuatan kecil dan menengah. Negara-negara tetangga Australia tidak memiliki kepentingan maupun kemampuan untuk menakuti Australia (Bisley, 2016). Meskipun penyerangan Jepang atas Darwin tahun 1942 dapat dilihat sebagai justifikasi kekhawatiran Australia atas keamanannya, terdapat kemungkinan bahwa penyerangan tersebut justru terjadi karena posisi Australia sebagai sekutu Inggris (Lim & McLennan, 1996). Serangan bom terhadap warga negara Australia di Bali tahun 2002 dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2004 dapat dianggap sebagai akibat dari keterlibatan

Australia dalam perang global AS melawan teroris (Global War On Terror atau GWOT).

Strategi pertahanan Australia yang tergantung pada Inggris atau AS, dan upaya untuk membangun pertahanan mandiri pernah dibahas dalam beberapa literatur terdahulu. Fase ketergantungan pertahanan dengan Inggris telah dibahas oleh Benvenuti (2004) dan Elijah (2006). Fase ketergantungan pertahanan dengan AS dibahas oleh Ford (2020) dan Beeson (2009). Sedangkan fase kemandirian hingga kembali kepada ketergantungan dibahas oleh Cheeseman (1991) dan Frühling (2014). Literatur-literatur tersebut umumnya memperdebatkan kebijakan pertahanan Australia baik ketika menjadi anggota aliansi maupun ketika berusaha untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri. Keterbatasan literatur terdahulu juga terjadi karena membahas sejarah pertahanan Australia secara parsial. Padahal, kebijakan pertahanan Australia yang tergantung pada Inggris atau/dan AS memperlihatkan evolusi respons Australia terhadap lingkungan strategisnya. Ditemukan satu artikel yang membahas berbagai kebijakan pertahanan Australia sejak tahun 1901 sampai 2020 dengan argumentasi bahwa kebijakan pertahanan Australia kontemporer dibentuk

oleh sejarah (Brown, 2020). Namun artikel ini bersifat deskriptif dan tidak menjelaskan faktor-faktor sejarah apa yang memengaruhi kebijakan Australia kontemporer.

Artikel ini berusaha mengisi celah literatur dengan menganalisa sejarah ketergantungan pertahanan Australia terhadap negara besar sebagai suatu proses evolutif, sejak berdirinya negara tersebut di awal abad ke-20 hingga saat ini dengan membahas keuntungan dan biaya sebagai anggota aliansi. Fokus pembahasan dalam artikel ini adalah bagaimana kalkulasi strategis yang dilakukan Australia sehingga negara ini bersedia menanggung biaya aliansi dengan mengorbankan kedaulatannya. Bagaimana pertimbangannya Australia yang mengorbankan kedaulatannya demi keamanannya (*survivability*)?

KERANGKA KONSEP

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan kerangka analisis dilema keamanan dan aliansi.

Dilema keamanan merupakan suatu konsep yang percaya bahwa negara selalu merasa khawatir terhadap keamanannya (*survivability*) (Jervis, 1978). Dalam kondisi sistem internasional yang anarki, masing-masing negara berlomba untuk meningkatkan pertahanannya agar dapat

merasa aman. Sayangnya, pertahanan defensif dan ofensif sulit dibedakan. Akibatnya, peningkatan kapabilitas suatu negara akan dirasakan sebagai ancaman oleh negara lainnya. Jervis meyakini kondisi ini terjadi pada sistem internasional dan memberikan analogi untuk menjelaskan opsi yang dapat diambil negara untuk mengatasi dilema keamanan. Seseorang dapat pindah ke lingkungan yang lebih aman, memasang jeruji pada jendela, menghindari jalan yang gelap, dan menjaga jarak dari orang yang tampak mencurigakan (Jervis, 1978). Langkah-langkah tersebut hanya dapat mengatasi dilema keamanan secara parsial dan temporer karena memberikan postur defensif. Akibatnya, opsi-opsi tersebut jarang diambil karena tidak nyaman, mahal, dan tidak pasti berhasil. Oleh karena itu, negara, sebagai aktor rasional, cenderung lebih memilih untuk melakukan hal yang lebih pasti untuk mendapatkan keamanan, yakni dengan meningkatkan kapabilitasnya (*internal balancing strategy*) atau bekerja sama dengan negara besar yang memberikan keamanan (*external balancing strategy*) (Jervis, 1978).

Logika negara untuk mengejar kepastian keamanannya melalui kerja sama dengan negara besar tersebut sejalan dengan teori aliansi. Synder menjelaskan bahwa

aliansi adalah asosiasi formal dari negara-negara (hasil dari *alignment*) yang ditujukan untuk menjaga keamanan (Snyder, 1990). Ciri ini membedakan aliansi dengan organisasi (seperti PBB) karena aliansi bertujuan untuk mengamankan anggotanya dari pihak di luar keanggotaannya (*against adversaries*). Untuk dapat berpartisipasi dalam aliansi, terdapat beban (*cost*) yang harus dibayarkan oleh sebuah negara; keputusan untuk ikut serta dalam sebuah aliansi mengindikasikan bahwa keuntungan yang didapat suatu negara lebih besar daripada harga yang harus dibayarkan (Snyder, 1990). Keuntungan sebagai anggota aliansi dapat berbentuk *mutual defense* dan penangkalan (*deterrence*). Smith juga mengakui penangkalan sebagai keuntungan aliansi, namun aliansi dapat membatasi kebebasan sebuah negara (kedaulatan) untuk mengambil keputusan (Smith, 1995). Oleh karena itu, keikutsertaan negara dalam sebuah aliansi adalah karena mereka mengejar kepentingan yang lebih besar (*fulfilling greater interest*) (Smith, 1995).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif diterapkan dalam tulisan ini. Data dalam penelitian ini

dikumpulkan dari data primer dan sekunder melalui studi literatur berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis yang melibatkan proses koding, klasifikasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang relevan. Hasil penelitian kemudian ditulis dan dilaporkan dengan jelas dan sistematis dalam format artikel.

PEMBAHASAN

Fase Ketergantungan Australia dengan Inggris

Pada awalnya, kebijakan pertahanan Australia merupakan kelanjutan dari status Australia sebagai negara koloni Inggris. Walaupun membentuk sebagai negara sendiri sejak tahun 1901, Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris karena tetap mengakui Monarki Inggris sebagai kepala negara dan menjadi anggota *Commonwealth*. Keamanan Australia tetap berada dalam perlindungan Kerajaan Inggris, dengan kebijakan keamanan dan pertahanan Australia yang selalu ditentukan oleh London (Donovan, 2020). Dengan demikian, Australia tidak mendapat kewenangan membentuk kebijakan pertahanan yang mandiri untuk mempertahankan wilayahnya. Pertahanan

dan keamanan wilayah Australia harus bergantung pada supremasi global angkatan laut Inggris yang (saat itu masih) mendominasi dunia (Benvenuti, 2004). Fenomena ini membentuk ketergantungan yang kuat dari Australia kepada angkatan bersenjata yang disediakan oleh Kerajaan Inggris. Tidak hanya dalam bidang pertahanan, Australia sebagai negara juga tidak berusaha untuk membentuk hubungan diplomatik dengan negara lain dan justru bergantung pada Kerajaan Inggris untuk mengatur hal tersebut.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa walaupun sudah merdeka, Australia tetap merupakan bagian dari Kerajaan Inggris dalam aspek pertahanan. Konsekuensinya, Australia terseret dalam perang yang dilakukan Inggris dengan ikut mengirimkan pasukan tempur walaupun sumber daya manusianya terbatas. Contoh-contoh keterlibatan Australia dapat dilihat dalam Perang Dunia I, yaitu melawan Jerman dan German New Guinea tahun 1914, Turki di tahun 1915, Terusan Suez dan Sinai di tahun 1916, Gaza dan Jerusalem di tahun 1917, dan Libanon dan Suriah di tahun 1918. Meskipun dukungan-dukungan tersebut menelan

banyak korban dari Australia dan perang dilakukan di wilayah yang jauh dari Australia, tetapi kebijakan pengiriman pasukan untuk mendukung tentara Inggris tetap dilanjutkan karena Australia percaya perang-perang tersebut akan membawa dampak positif pada keamanan Australia. Kepercayaan Australia terhadap perlindungan Inggris menguat ketika Inggris menempatkan pasukannya di Singapura pada tahun 1920 (Strategi Singapura²).

Australia tetap menggantungkan pertahanannya pada Inggris walaupun negara ini mengalami penurunan kekuatan yang cukup signifikan akibat Perang Dunia I. Inggris dapat melewati Perang Dunia I namun kekuatan militer maupun ekonomi menurun drastis dibandingkan pada masa kejayaannya di bab ke 19. Pasca Perang Dunia I, Inggris kehilangan 715.000 pasukannya akibat perang (dengan jumlah yang terluka dua kali lipatnya) dan 3,6 persen dari sumber daya manusianya (Broadberry & Harrison, 2005). Dalam aspek ekonomi terjadi peningkatan pengangguran, menurunnya perdagangan, dan meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap pendapatan domestik bruto (Crafts,

² Melalui strategi ini, Inggris membangun pangkalan angkatan laut di Singapura untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut, yang dianggap sejalan dengan kepentingan strategis Australia. Lihat

Fall of Singapore melalui <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/fall-of-singapore>.

2014). Kondisi ini penting untuk digarisbawahi karena pertahanan Australia sepenuhnya bergantung pada kemampuan Kerajaan Inggris. Penurunan kekuatan ekonomi Inggris secara langsung memengaruhi kapabilitas militernya. Namun demikian, pertahanan Australia masih tergantung pada Inggris walaupun sebagai pihak di Australia mulai mengkhawatirkan kondisi tersebut (Beaumont, 2014).

Dukungan Australia terhadap Inggris terus berlanjut hingga pada masa Perang Dunia II. Sebagaimana perang-perang sebelumnya, Australia juga tetap harus mendukung Inggris dalam Perang Dunia II setelah UK menyatakan perang terhadap Nazi Jerman. Di bawah kepemimpinan Robert Menzies, Australia berpartisipasi melawan Jerman dan Italia (blok Axis) di Eropa, Mediterania, dan Afrika utara (Beaumont, 1996). Tidak hanya di wilayah-wilayah yang jauh dengan Australia (seperti sebelumnya), dukungan Australia terhadap pasukan Inggris juga dilakukan di Asia Tenggara. Australia juga mengirim pasukannya ke Malaya, New England, Timor, hingga Papua Nugini sebagai bagian dari pasukan Inggris melawan tentara Jepang (Morton, 1961). Namun demikian, dukungan Australia terhadap Inggris tidak berlangsung

lama. Jepang yang berhasil menyerang Pearl Harbour tahun 1941 memulai perang Pasifik dan mulai menaklukkan wilayah koloni Inggris di Asia Pasifik. Kemampuan Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini menurun setelah jatuhnya Singapura atas Jepang pada Februari 1942 (Benvenuti, 2004).

Kekalahan pasukan Inggris di Singapura menjadi momentum penting yang memperlihatkan bahwa Inggris tidak mampu lagi memberikan perlindungan keamanan kepada Australia. Beberapa hari setelah kejatuhan Singapura, Jepang berhasil melancarkan serangan pada Darwin (Hall, 1980). Australia tidak dapat mencegah serangan tersebut karena sebagian besar pasukannya dikerahkan di luar wilayah Australia sebagai bentuk dukungan terhadap Inggris. Wilayah utara Australia (*Northern Territory*) dengan Ibu Kota Darwin diduduki tentara Jepang pada tanggal 19 Februari 1942.

Keberhasilan Jepang menduduki teritorinya mendorong Australia untuk mengevaluasi ketergantungan pertahanannya pada Inggris dan berusaha mencari mitra pertahanan yang lebih dapat diandalkan. Namun karena sifat keanggotannya dalam *Commonwealth*, Australia tidak dapat benar-

benar terlepas dari Inggris dalam kebijakan pertahanannya (Elijah, 2006). Pasca Perang Dunia II, Australia terlibat dalam *Five Power Defence Arrangement* (FPDA) yang dibentuk Inggris untuk mengamankan negara persemakmurnya karena kapabilitas Inggris menurun secara drastis. Hal ini dikonfirmasi oleh penjelasan dari Inggris bahwa keterlibatan militernya di Asia akan dibatasi dalam ukuran dan cakupan. FPDA bersifat aliansi terbatas karena anggota-anggotanya hanya berkomitmen untuk melakukan konsultasi jika salah satu negara antanya diserang (Benvenuti, 2004).

Ketergantungan keamanan Australia terhadap Inggris tidak dapat dilanjutkan karena Inggris tidak mampu lagi menjaga Australia dari ancaman musuh, yang ditandai dengan peristiwa jatuhnya Singapura. Padahal, perlindungan pertahanan oleh Inggris merupakan keuntungan utama yang diharapkan Australia dalam skema aliansinya dengan Inggris. Sebelum Perang Dunia II, Australia tidak hanya mendapatkan perlindungan pertahanan tetapi juga keunggulan strategis lainnya dari kekuatan militer Inggris, seperti memanfaatkan proyeksi kekuatan Angkatan Laut, kekuatan politik, ekonomi, dan jalur komunikasi yang dimiliki mantan penguasanya tersebut (Kilcullen, 2007). Setelah Perang Dunia II,

Australia hanya mendapatkan keamanan semu dalam FPDA karena aliansi yang dipimpin Inggris ini tidak memiliki peraturan mengikat untuk saling melindungi (*mutual defense agreement*). Tanpa kerangka pertahanan kolektif ini, Inggris tidak wajib untuk melindungi bila Australia diserang. Dengan demikian, tidak ada lagi keuntungan yang bisa didapatkan Australia dari aliansinya dengan Inggris.

Fitur keamanan sebagai keuntungan dari aliansi merupakan hal krusial bagi Australia, mengingat negara ini memiliki persepsi ancaman yang tinggi terhadap wilayah sekitarnya. Pada saat itu, identitas keamanan Australia masih sangat lekat dengan negara Barat. Kesamaan profil demografi, nilai, kultur, serta pengakuannya terhadap Monarki Inggris, menunjukkan identitas Barat yang dipegang erat oleh Australia (Kang & Im, 2021). Masalah kemudian muncul karena Australia, secara geografis, terletak jauh dari negara-negara Barat dan justru dekat dengan Asia yang berpenduduk padat dan kultur yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan kekhawatiran yang mendalam bagi Australia terhadap keamanannya karena melihat Asia sebagai ancaman (Walker, 1999). Terletak di selatan wilayah Asia membuat Australia untuk

sebisa mungkin mencegah terjadinya konflik di sebelah utara wilayahnya (Arif, 2013).

Tingginya rasa tidak aman (*insecurity*) Australia terhadap wilayah sekitarnya dan ketidakmampuannya untuk melindungi dirinya sendiri mendorong negara ini untuk selalu beraliansi dengan negara besar. Keamanan merupakan keuntungan utama yang dikejar oleh Australia dari sebuah aliansi. Pentingnya keuntungan tersebut dapat menjustifikasi pengorbanan Australia untuk mendukung kepentingan strategis Inggris sebagai ongkos aliansinya dengan negara tersebut. Dengan hilangnya jaminan perlindungan dari Inggris, maka tidak ada alasan bagi Australia untuk tetap menggantungkan keamanannya pada negara tersebut. Kebutuhan akan keamanan yang diberikan oleh aliansi membawa Australia untuk mencari negara besar lainnya yang dapat diandalkan, yaitu AS.

Fase Ketergantungan Australia dengan Amerika Serikat

Selain menunjukkan ketidak mampuan Inggris untuk melindungi Australia, Perang Dunia II juga menjadi momentum mulainya ketergantungan pertahanan Australia terhadap AS. Penyerangan atas Darwin menyadarkan Australia bahwa Inggris tidak lagi memiliki kemampuan yang cukup untuk

melindungi wilayah Australia setelah peristiwa jatuhnya Singapura. Di saat yang bersamaan, Australia juga tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk dapat mempertahankan wilayahnya setelah bergantung terhadap Kerajaan Inggris untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Australia mulai mencari mitra lain untuk dapat memastikan keamanannya, yakni AS.

Hubungan strategis antara Australia dengan AS dimulai dengan keikutsertaan Australia dalam *Five Eyes*, yang dipimpin oleh AS untuk pertukaran informasi intelijen. Selanjutnya, hubungan kedua negara semakin dekat ketika mereka bekerja sama melawan angkatan bersenjata Jepang di wilayah Pasifik pada Perang Dunia II. Pada 1942, John Curtin, Perdana Menteri Australia, secara terbuka menyampaikan bahwa Australia akan memosisikan dirinya dekat dengan AS (meskipun terdapat hambatan akibat kedekatan Australia dengan Inggris) dan akan menaruh AS sebagai landasan pertahanan, sehingga Australia secara percaya diri akan mampu bertahan dari pertempuran-pertempuran yang akan datang.

Hubungan kedua negara semakin berkembang pada masa Perang Dingin. Australia terlibat dalam blok Barat yang

dipimpin AS dalam Perang Korea dan Vietnam untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Asia. Bahkan tahun 1951 Australia dan New Zealand secara formal ikut serta dalam aliansi strategis blok Barat yang dipimpin oleh AS melalui pembentukan Pakta Pertahanan di Pasifik Selatan dalam Australia, New Zealand and the US (ANZUS) (Ford, 2020). Sebagai institusi hasil perang dingin, ANZUS dibentuk untuk melawan dan membendung komunisme di Asia Pasifik (Dupont, 1991). Dengan demikian ANZUS berfungsi sebagai payung pertahanan yang diberikan AS terhadap Australia dan Selandia Baru dari ancaman negara-negara komunis pada masa itu.

Sebagaimana dukungan Australia pada kepentingan strategis Inggris, harga yang sama juga dibayarkan oleh Australia dalam aliansinya bersama AS. Sebagai anggota aliansi, Australia mengirimkan pasukan untuk mendukung AS pada Perang Vietnam dan Korea (Ford, 2020). Bahkan menurut Beeson (2009), tidak ada negara lain yang berpartisipasi secara rutin seperti Australia dalam konflik-konflik besar yang melibatkan AS. Dukungan ini dilakukan oleh Australia demi mendapatkan perlindungan dari AS terhadap pihak-pihak yang dianggap

mengancam pada saat itu, yakni negara komunis dan negara yang tidak stabil di Asia.

Berbeda dengan dukungannya terhadap kepentingan strategis Inggris, dukungan strategis yang diberikan Australia kepada AS dijustifikasi melalui kepentingan nasionalnya. Di masa Perang Dingin, keterlibatan Australia dalam blok Barat di berbagai konflik dikategorikan sebagai bagian dari strategi *forward defense* negara tersebut (Edwards, 2015). Strategi pertahanan *forward defense* secara sempit dapat diartikan sebagai pengerahan pasukan di luar wilayah Australia demi mencegah musuh potensial mencapai Australia (Haider, 2014). Melalui doktrin ini, Australia percaya bahwa keamanannya dapat dijaga dengan bergabung pada misi-misi strategis mitranya, yaitu AS. Partisipasi Australia dalam berbagai konflik untuk membela AS melalui strategi *forward defense* dilakukan oleh Perdana Menteri Robert Menzies dengan tujuan untuk mengikat AS lebih erat dengan Australia, sehingga AS akan memberikan dukungan yang sama ketika Australia membutuhkannya (Ford, 2020). Selain itu, strategi *forward defense* menggambarkan persepsi ancaman Australia yang didasarkan pada perbedaan ras dan ideologi dengan negara-negara di sekitarnya karena strategi tersebut ditujukan untuk melawan ancaman

orang-orang berkulit kuning (*Yellow Peril*) (Edwards, 2015).

Selama Perang Dingin, keterlibatan Australia membela AS dalam konflik-konflik di luar wilayahnya membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Di wilayah konflik, Australia ikut menanggung kekalahan yang dialami AS, termasuk korban jiwa dan biaya logistik. Dalam konstelasi politik internasional, keterlibatan Australia dalam blok Barat juga menjadikan negara ini sebagai musuh bagi semua negara blok timur. Selain itu, di dalam negeri, Pemerintah Australia juga harus menanggung beban politik yang cukup besar. Masyarakat Australia melakukan protes, demonstrasi, dan kritik terhadap keterlibatan Australia di Perang Vietnam (Saunders, 1982). Protes ini menunjukkan terdapat resistensi dari masyarakat Australia terhadap keikutsertaan Australia pada perang milik orang lain. Dengan demikian, dukungan Australia terhadap aliansi yang dipimpin AS menimbulkan beban yang lebih besar daripada aliansinya dengan Inggris.

Hubungan Australia dan AS mengalami penurunan yang signifikan setelah AS memutuskan untuk menarik diri dari Asia setelah kealahannya di Perang Vietnam. Hal ini diperburuk dengan

pernyataan Richard Nixon yang mengumumkan bahwa AS akan terus memberikan payung nuklir kepada sekutunya, namun mengharapkan mereka untuk berbuat lebih banyak untuk diri mereka sendiri (dikenal sebagai *Nixon Doctrine* atau *Guam Doctrine*) (Lim, 1998). Pernyataan tersebut secara langsung mengindikasikan bahwa AS tidak lagi secara penuh dapat berkomitmen untuk mengamankan mitra-mitra aliansinya, termasuk Australia. Menurunnya komitmen AS di Asia menyebabkan Australia kembali merasa ditinggalkan oleh mitra pertahanannya dan memicu *insecurity* negara tersebut.

Ketergantungan pertahanan Australia terhadap AS merupakan manifestasi dari kebutuhannya atas rasa aman. Setelah Perang Dunia II, Australia merasa terancam oleh negara-negara komunis dan negara-negara besar di sekitarnya. AS menjadi pelindung keamanan yang menjanjikan bagi Australia karena terbukti telah mengalahkan Jepang, mampu menandingi kekuatan negara-negara komunis, dan memiliki senjata nuklir. Kapabilitas AS tampaknya sangat meyakinkan bagi Australia, apalagi dengan adanya pakta pertahanan ANZUS yang memiliki kesepakatan keamanan kolektif sehingga memberikan penangkal terhadap

negara-negara yang dianggap Australia sebagai sumber ancaman.

Keuntungan keamanan dan penangkalan tersebut sangat penting bagi Australia untuk dapat melindungi diri dari pihak-pihak yang dipersepsikan sebagai ancaman pada masa itu, yakni komunisme dan negara-negara besar di Asia. Oleh karena itu, Australia rela memenuhi biaya aliansi dengan mendukung kepentingan strategis AS, meskipun terdapat kritik dari masyarakat Australia. Namun menurunnya komitmen AS di Asia setelah Perang Vietnam mengkhawatirkan Australia. Fenomena ini kembali menimbulkan insecurity dan mendorong debat publik di negara ini untuk membangun pertahanannya sendiri.

Fase Pertahanan Mandiri Australia

Ketidakmampuan, atau keengganan, Inggris dan AS untuk memberikan perlindungan absolut memicu Australia untuk mempertimbangkan strategi pertahanan baru dengan kapabilitas pertahanan yang mandiri. Strategi *forward defense* dengan mengirimkan pasukan Australia demi agenda dan kepentingan mitranya, juga dianggap bermasalah karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional Australia. Pasukan Australia dianggap menjadi korban dalam perang yang bukan

memperjuangkan kepentingan Australia. Selain itu, keterlibatan dalam pertempuran di luar wilayah Australia dianggap membuat Australia rentan terhadap ancaman langsung ke wilayahnya, terutama dari Indonesia yang saat itu menjadi kekhawatiran utama negara tersebut (Fitriani, 2012).

Menjelang akhir tahun 1970-an, Australia terpaksa harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mempertahankan keamanan wilayahnya akibat menurunnya komitmen AS di Asia. Negara ini membentuk kebijakan pertahanan baru, yaitu *Defense of Australia* atau Pertahanan Australia, untuk menghentikan ketergantungan keamanan Australia dan menggantikan strategi *forward defense* yang dianggap sudah tidak relevan. Salah satu strategi dalam kebijakan pertahanan ini adalah memposisikan pasukan militer Australia sebagai pertahanan utama di wilayah Australia untuk menghadapi serangan negara lain tanpa bergantung pada kekuatan tempur eksternal (aliansi) (Haider, 2014). Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Australia berusaha membangun kemandirian dalam pertahanan demi mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas dan fleksibel, sesuai dengan kepentingan Australia.

Terdapat tiga inisiatif Pemerintah Australia dalam membangun pertahanan

mandiri. Pertama, menarik diri dari keikutsertaannya pada perang-perang milik mitranya. Inisiatif ini dilakukan oleh Perdana Menteri Gough Whitlam, yang berasal dari Parai Buruh, dengan menarik pasukan militer Australia dari Vietnam 1972, menghentikan program bantuan pertahanan kepada Vietnam Selatan dan Kamboja, dan mengatur rencana penarikan mundur secara bertahap pada pasukan Australia di Singapura (Cheeseman, 1991). Inisiatif-inisiatif ini dilakukan untuk dapat fokus mempertahankan wilayah Australia dan tidak lagi ikut serta dalam perang-perang di luar wilayah Australia. Buku Putih 1976 mempertegas keinginan ini dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata Australia tidak lagi dikembangkan dan dilatih untuk dikirim ke luar negeri untuk berperang sebagai bagian dari pasukan negara lain (Cheeseman, 1991).

Inisiatif kedua yang dijalankan Pemerintah Australia adalah berusaha membangun postur pertahanan yang kuat untuk dapat melindungi wilayahnya. Upaya ini mulai dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Fraser dengan memperkuat kekuatan tempur dari pasukan Australia. Pada pemerintahannya, Fraser berusaha memodernisasi pasukan Australia dengan meningkatkan kapabilitas

pengawasan dan intersepsi militer Australia, menambah jangkauan misil, membeli peralatan perang baru (tank, pesawat, dan kapal selam), hingga memperkuat pangkalan militer (Cheeseman, 1991).

Inisiatif ketiga adalah dengan melakukan *trust building* kepada negara-negara yang dianggap ancaman bagi Australia. Inisiatif ini dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Bob Hawke dan Paul Keating yang berusaha menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Asia di sekitarnya. Kebijakan Hawke tahun 1980-an dan Keating tahun 1990-an berfokus untuk membangun kerja sama dengan Asia, sebuah inisiatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada masa Hawke, Australia mulai berpartisipasi pada regionalisme di Asia, dengan mendorong berdirinya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (McDhoughall, 2001). Pada masa Keating, Australia mulai mengirimkan pejabat senior pemerintah ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia, dengan tujuan untuk memahami negara-negara Asia, melalui program Leading Australia's Future in Asia (LAFIA) (Fitriani, 2018). Keating menjalin persahabatan yang cukup dekat dengan Presiden Soeharto, menjadikan keduanya pemimpin Indonesia dan Australia pertama

yang memiliki hubungan spesial. Inisiatif *trust building* tersebut dilakukan untuk menciptakan *confidence* dalam rangka mendukung strategi pertahanan Australia yang mandiri.

Meskipun ketiga inisiatif tersebut telah diupayakan, tetapi Australia tampaknya tetap tidak mampu untuk mempertahankan wilayahnya secara mandiri. Tekanan politik internasional dan dinamika domestik Australia mengakibatkan negara tersebut tidak dapat benar-benar melepaskan diri dari perlindungan keamanan negara-negara besar. Pada pertengahan dekade 1980an, Australia masih bergantung pada intelijen, logistik, dan perlengkapan buatan negara lain (AS dan Inggris) (Fitriani, 2012). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dalam Buku Putih pertahanan tahun 1987 Australia mengadopsi kebijakan yang ambigu dengan menggunakan frasa “kemandirian dalam kerangka aliansi” sebagai pemaknaan dari strategi kemandirian pertahanan Australia (Lim, 1998). Penggunaan frasa ini mengindikasikan tidak hanya kegagalan kebijakan pertahanan mandiri Australia tapi juga kembalinya negara tersebut ke kebijakan pertahanan yang mengandalkan perlindungan negara-negara besar.

Literatur-literatur yang membahas pertahanan Australia pada periode ini

umumnya menyepakati ketidakmampuan Australia untuk benar-benar terlepas dari ketergantungan terhadap aliansi. Tinjauan strategis Australia tahun 1997 membuka kembali kemungkinan kerja sama dalam aliansi dengan menyampaikan bahwa dibutuhkan kesediaan yang lebih besar dari Australia untuk mengerahkan pasukannya dalam misi-misi sekutunya demi dapat membentuk dan memengaruhi lingkungan strategis Australia (Lim, 1998) Dalam Buku Putih dan *Defense Review* dari tahun 2000 hingga 2009 istilah kemandirian pertahanan sudah hilang; negara tersebut justru menitik beratkan strategi pertahanannya pada operasi koalisi (Frühling, 2014). Dengan demikian, Australia kembali menggantungkan keamanannya pada negara-negara besar.

Dalam fase ini, Australia tidak mendapatkan keuntungan yang dikejar dari sebuah aliansi, yaitu perlindungan yang pasti dari mitra-mitranya. Pada masa pertahanan mandiri ini, walaupun masih tergabung dalam FPDA dan ANZUS, Australia merasa tidak mendapatkan keamanan yang pasti karena baik Inggris maupun AS tidak berkomitmen untuk menjamin keamanan Australia. Padahal, pada masa ini, Australia sedang mengkhawatirkan keamanannya dari Indonesia. Hal ini tampaknya menyebabkan keengganan Australia untuk terus

menanggung beban dari kedua aliansi tersebut sehingga menarik diri dari kepentingan-kepentingan strategis kedua mitra aliansinya tersebut. Fenomena ini memaksa Australia untuk menciptakan pertahanan yang mandiri, meskipun pada akhirnya gagal dan membawa Australia kembali kepada mitra aliansinya.

Fase Kembalinya Ketergantungan Australia pada Amerika Serikat dan Inggris

Ketidakmampuan Australia untuk mempertahankan keamanannya sendiri membuat Australia harus kembali menyesuaikan diri dengan kepentingan strategis mitra aliansinya. Kecenderungan ini didorong dengan kepemimpinan Perdana Menteri John Howard yang bersikap lebih agresif terhadap Asia dan memegang erat nilai-nilai Barat. Oleh karena itu, kekhawatiran Australia terhadap keamanannya meningkat dan ketergantungan Australia terhadap AS dan Inggris kembali menguat.

Pada dekade pertama tahun 2000-an, perbaikan hubungan antara Australia dengan AS dan Inggris tidak berjalan cepat, tetapi tumbuh secara perlahan. Pendekatan kembali Australia dan AS terjadi lebih dahulu karena didorong oleh kesamaan kepentingan melawan teroris. Gelombang serangan teroris

menyerang kedua negara di awal tahun 2000-an yang mendorong AS mencanangkan GWOT. Melalui ANZUS, Australia mendukung invasi AS ke Afghanistan dalam kerangka GWOT (Dean, 2016). Meskipun dalam jumlah yang sedikit, hanya 1550 pasukan dibandingkan dengan Inggris yang mengirim 7700 dan Kanada sebanyak 2300, dukungan pasukan Australia –pertama kalinya setelah Perang Vietnam melakukan operasi militer di luar wilayahnya– menunjukkan komitmennya untuk kembali aktif dalam aliansinya dengan AS (Ford, 2020).

Keputusan untuk kembali membantu AS dalam misi GWOT memberikan Australia beberapa keuntungan aliansi. Australia berhasil meningkatkan hubungan intelijen dan kerja sama pertahanan, menaruh pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di Washington, mendapatkan perjanjian perdagangan bebas, meningkatkan keterlibatan AS di kawasan, mendapatkan prestise yang lebih besar di Asia (karena kedekatannya dan kemampuan mempengaruhi Washington), dan pemimpin Australia mendapat perhatian yang besar di mata masyarakatnya (Sheridan, 2006). Bahkan pada tahun 1999, Perdana Menteri Howard dengan bangga menyatakan

Australia sebagai perwakilan *sherrif* AS di Asia Pasifik (Fickling, 2004).

Tidak hanya pada masa Presiden George W. Bush Jr, hubungan pertahanan antara Australia dan AS juga terus berkembang sepanjang era Pemerintahan Presiden Barrack Obama walaupun menghadapi ancaman yang berbeda. Menurunnya komitmen AS di Asia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dianggap memberikan ruang terhadap menguatnya Tiongkok yang pada gilirannya dianggap mengancam dominasi kekuatan AS dan sekutunya di Asia Pasifik. Pada akhir dekade pertama abad ke 21, baik AS maupun Australia menganggap peningkatan kekuatan ekonomi dan modernisasi militer Tiongkok mengkhawatirkan. Karena itu, AS mencanangkan kebijakan *Pivot to Asia* pada tahun 2009 (Candra, 2013). Selanjutnya, pada tahun 2011, Presiden Obama menyatakan di hadapan Parlemen Australia bahwa dirinya akan mengembalikan pengaruh AS di kawasan Asia-Pasifik dan memproyeksikan kekuatan AS untuk mencegah ancaman (The Guardian, 2011). Tidak lama setelah itu, Presiden Obama dan Perdana Menteri Julia Gillard bersama-sama mengumumkan Inisiatif Postur Pasukan (*Force Posture Initiative*), sebuah perjanjian yang menempatkan 2.500 marinir AS di

Darwin hingga tahun 2017 (Kusumasomantri, 2018); dan memberikan ruang kepada Angkatan Udara AS untuk memanfaatkan lebih luas fasilitas-fasilitas militer di Australia bagian utara sebagai bagian dari strategi *Pivot to Asia* (Ford, 2020).

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Australia tetap menjalin hubungan strategis yang erat dengan AS meskipun sebagian kalangan mengkhawatirkan komitmen pertahanan Presiden AS yang kontroversial tersebut. Gagasan *American First* Trump sempat menjadi kekhawatiran bagi sekutu-sekutu AS, termasuk Australia. Namun demikian, pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull di tahun 2018, Trump menegaskan kembali kekuatan aliansi antara AS dan Australia serta keselarasan kepentingan dan nilai-nilai kedua negara di kawasan Indo-Pasifik (The White House, 2018). Di saat yang bersamaan, Australia juga dianggap tidak memiliki opsi alternatif dalam strategi pertahanannya sehingga para pembuat kebijakan di Australia tampaknya hanya dapat “menunggu” Trump dengan harapan bahwa “keadaan seperti biasa” akan segera dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya (Beeson & Bloomfield, 2019). Dengan demikian, tidak terjadi banyak

perubahan dalam hubungan pertahanan antara Australia dan AS pada masa pemerintahan Trump. Menjelang akhir masa jabatan Trump, AS dan Australia bergabung bersama Jepang dan India dalam Quadrilatera Dialogue (QUAD) meluncurkan Indo Pacific Strategi untuk membendung China (Pertiwi, 2020). Strategi Indo Pacific ini memperkuat kerjasama pertahanan Australia dan AS menghadapi negara yang dianggap sebagai sumber ancaman dewasa ini.

Tidak seperti "normalisasi" hubungan pertahanan Australia dengan AS yang sudah terjadi sejak selesainya Perang Dingin, hubungan Australia dengan Inggris baru memunculkan tanda-tanda kedekatan kembali sejak tahun 2010 meskipun kedua negara masih tergabung dalam aliansi FPDA. Normalisasi hubungan pertahanan kedua negara dapat terjadi melalui jalur kerja sama bilateral Australia-UK Ministerial Consultations (AUKMIN), yang merupakan forum pertemuan dan konsultasi antara kementerian Australia dan Inggris. Forum tersebut memfasilitasi kekhawatiran Inggris terhadap kawasan Asia-Pasifik dan menumbuhkan keinginan Australia untuk kembali bermitra dengan Inggris (Hall I. , 2022)

Kerja sama kedua negara dimulai dengan konsentrasi pada isu-isu ekstra regional, seperti Afghanistan, Timur Tengah, keamanan siber, dan iklim, seperti yang terlampir pada *communiqué* AUKMIN tahun 2011. Kerja sama semakin meluas dengan adanya tantangan di kawasan Asia-Pasifik. Kedua negara meyakini bahwa terdapat keperluan untuk menjunjung pendekatan berbasis aturan (*rule-based order*) dalam tata kelola regional dan global di kawasan Asia-Pasifik (Australian Politics, 2011). Komitmen Inggris terhadap kawasan ini juga dapat dilihat dari adanya peningkatan komitmen militer Inggris terhadap FPDA, pengiriman *Royal Air Force Typhoon* dan beberapa kapal untuk berbagai latihan (Government UK, 2011).

Perkembangan kerja sama pertahanan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan perjanjian pertahanan dan keamanan bilateral pada AUKMIN 2013 di Perth. Perjanjian tersebut memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi yang lebih besar mengenai isu-isu strategis dan pertahanan, serta kerja sama industri pertahanan dan keamanan siber antara kedua negara (Hall I. , 2022). Pada forum dialog AUKMIN 2014, kemudian, Australia memberikan Inggris akses ke fasilitas

angkatan laut di Darwin (Scott, 2018). Pada AUKMIN tahun 2018, kedua negara menghasilkan 16 poin pernyataan mengenai pertahanan tatanan internasional yang berbasis aturan dan menjaga kebebasan pelayaran di kawasan LCS, tanpa menyebutkan Tiongkok sebagai sumber ancaman (Hall I., 2022). Dibentuk pula *joint action plan* yang mengatur penyediaan kapal fregat kelas Hunter untuk Australia dan komitmen untuk meningkatkan latihan bersama dalam kerangka FDPA (Hall I., 2022). AUKMIN tahun 2018 menandai puncak rekonsiliasi dari hubungan pertahanan Australia dan Inggris karena AUKMIN selanjutnya harus tertunda karena permasalahan Brexit dan pandemi Covid-19. Relevansi kerjasama kedua negara makin meningkat setelah Inggris keluar dari Uni Eropa (EU) dan berusaha membangun profil internasionalnya.

Hubungan pertahanan dengan negara-negara besar mitra pertahanannya memasuki fase baru tahun 2021 ketika negara ini secara resmi mengumumkan platform aliansi strategis baru dengan mitra lama yaitu AS dan Inggris dalam AUKUS. Aliansi ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama diplomatik, keamanan, dan pertahanan antara ketiga negara, dengan mengikat ketiganya dalam sebuah aliansi pertahanan (Corben,

Ashley, & Patton, 2021). Aliansi dibentuk sebagai respons atas tantangan keamanan yang tumbuh secara signifikan di kawasan Indo-Pasifik (Defence Ministers Australian Government, 2021). Meskipun aliansi ini tidak menyebutkan Tiongkok secara eksplisit ancaman, tetapi diskursus akademis sepakat bahwa aliansi ini bertujuan untuk membendung Tiongkok, pihak yang juga dianggap Australia sebagai ancaman. Melalui aliansi ini AS (dan juga Inggris) akan mendapatkan akses untuk hadir di wilayah Australia dan Asia. Keanggotaan AUKUS secara otomatis menempatkan Australia bersama AS dalam kontestasinya dengan Tiongkok dan mewajibkan Australia untuk mendukung AS jika dibutuhkan.

Kegagalan Australia untuk mendirikan pertahanan yang mandiri menyadarkan Australia bahwa kebutuhannya terhadap perlindungan negara besar adalah mutlak. Hal ini menyebabkan Australia kembali bersedia menanggung beban aliansi dengan mendukung kampanye GWOT AS. Serangan terorisme terhadap Australia tidak hanya merupakan beban aliansi yang harus ditanggung negara ini, tapi sekaligus juga membuktikan bahwa negara tersebut rentan terhadap ancaman non-tradisional. Mengingat tidak ada opsi lain bagi Australia selain mengandalkan kemampuan negara

besar lain dalam menghadapi ancaman teroris global, negara ini masih menggunakan skema aliansi ANZUS. Dalam kondisi ini, Australia diuntungkan oleh strategi *Pivot to Asia* Presiden Obama yang secara langsung meningkatkan perhatian AS di kawasan Australia. Bersamaan dengan keuntungan aliansi yang dinikmati Australia, negara ini juga harus kembali membayar biaya aliansi dengan mendukung kepentingan strategis AS.

Dalam konteks hubungan pertahanannya dengan Inggris, Australia "diuntungkan" dengan menguatnya ancaman Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik yang mendorong Inggris untuk meningkatkan kembali hubungan strategisnya dengan Australia. Tampaknya, perlindungan Inggris dalam kerangka FPDA pada masa ini menjadi lebih meyakinkan bagi Australia, jika dibandingkan dengan pasca Perang Dunia II. Meskipun kesepakatan pertahanan kolektif tidak ditambahkan, tetapi komitmen Inggris terhadap kawasan Asia-Pasifik tumbuh secara signifikan dengan meningkatnya kehadiran Inggris di kawasan melalui aliansi FPDA. Selain keamanan, Australia juga mendapatkan keuntungan strategis lainnya, seperti pertukaran informasi intelijen dan penanganan ancaman

non-tradisional lain, yakni ancaman perubahan iklim.

Kerjasama pertahanan Australia dengan AS dan Inggris secara bersamaan sejak setidaknya 2010 dan mencapai puncaknya pada AUKUS dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketakutan Australia terhadap ancaman di sekelilingnya. Dengan memiliki aliansi sekaligus dengan dua negara besar, Australia semakin merasa *confidence* karena memiliki perlindungan ganda. Baik AS maupun Inggris memiliki ancaman utama yang sama-sama beririsan dengan Australia, yaitu terorisme dan Tiongkok, sehingga ongkos aliansi dapat dilakukan oleh Australia secara serentak. Dalam konteks AUKUS, biaya aliansi yang ditanggung oleh Australia juga tidak menjadi mahal karena kepentingan strategis AS dan Inggris juga selaras dengan kepentingan pertahanan negara tersebut, yakni Tiongkok. Hal ini terlihat dari usaha Australia untuk terus meningkatkan jangkauan maritimnya demi mengamankan sea lines of communication (SLOC) yang terancam oleh Tiongkok (Tertia & Perwita, 2018).

Sejarah panjang dengan aliansi dan perlindungan eksternal membentuk kultur strategis Australia. Seperti yang disampaikan oleh Bisley dan Lantis, kultur strategis

Australia adalah bergantung pada kekuatan eksternal atau *relying on great and powerful friends*. Hal ini dapat terjadi karena adanya sejarah panjang antara Australia dengan aliansi, yang bahkan sudah dimulai sejak berdirinya Australia di tahun 1901. Pemilihan Inggris dan AS sebagai mitra aliansi juga terbentuk dari sejarah panjang antara Australia dengan kultur *anglosphere*. Akibatnya, Australia juga memandang dirinya sebagai salah satu "keluarga" dari negara-negara tersebut. Ini menjelaskan kepercayaan mendalam dari Australia terhadap perlindungan keamanan dari kedua negara besar tersebut. Ketergantungan Australia pada perlindungan keamanan Inggris, kemudian berpindah pada AS, dilanjutkan dengan strategi pertahanan mandiri dan diakhiri dengan kembali bergantung pada kedua negara tersebut merefleksikan kalkulasi strategis Australia terhadap manfaat dan beban aliansi terhadap kedua negara besar tersebut.

SIMPULAN

Keamanan adalah kebutuhan mutlak dari suatu negara untuk dapat terus *survive*. Dalam konteks Australia, negara ini tidak memiliki *confidence* dan kapabilitas untuk menjaga keamanannya sendiri. Sejarah panjang dengan Kerajaan Inggris membiasakan Australia untuk terus

mengandalkan pihak lain untuk menjaga wilayahnya. Oleh karena itu, Australia tidak memiliki opsi lain selain bergantung pada negara-negara besar. Periode-periode penting dalam sejarah pertahanan Australia membentuk sebuah fase evolusi dari strategi pertahanan Australia. Dengan menghubungkan periode-periode tersebut, dapat terlihat bahwa Australia memiliki kelekatan dengan aliansi Barat.

Aliansi memberikan Australia keuntungan berupa keamanan yang merupakan kebutuhan esensialnya, sehingga Australia tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi biaya dari aliansi tersebut. Partisipasi dan dukungan Australia terhadap perang-perang yang dilakukan oleh Inggris dan AS adalah biaya yang harus ditanggung oleh Australia agar tetap dapat menikmati keuntungan-keuntungan tersebut. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan protes dari masyarakat (misalnya pada Perang Vietnam), Australia tetap melanjutkan dukungan pada operasi-operasi militer AS selanjutnya, seperti di Afghanistan dan Irak. Sejak tahun 2001, Australia justru mempererat aliansinya dengan AS dan tidak mengindahkan rekomendasi dari berbagai ahli untuk menjadi lebih mandiri dari AS (Bisley, 2019).

Ketergantungan terhadap negara besar merupakan hasil dari kalkulasi rasional yang diperhitungkan Australia demi dapat mengatasi dilema keamanannya. Meskipun aliansi datang dengan keuntungan dan kerugian, tetapi aliansi membawa lebih banyak keuntungan daripada kerugian bagi Australia. Aliansi memberikan Australia keamanan melalui pertahanan bersama maupun penangkalan. Melalui aliansi pula Australia dapat turut mengambil bagian dalam membentuk kawasannya, mendapatkan senjata dan teknologi canggih (melalui skema pilar pertama dan kedua aliansi AUKUS) (Jaknanihan, 2022); hingga informasi-informasi strategis yang berguna bagi pertahanan Australia. Manfaat-manfaat tersebut berguna dalam membentuk keamanan dan pertahanan yang dibutuhkan Australia, sehingga Australia rela memenuhi biaya yang diperlukan oleh aliansi-aliansi tersebut. Sebagai hasil, Australia selalu terlibat dalam operasi-operasi militer yang melibatkan mitra-mitranya, dari Perang Dunia I hingga rivalitas antara AS dengan Tiongkok pada era kontemporer.

REFERENSI

- Arif, M. (2013). Intervensi Militer Indonesia di Timor Portugis 7 Desember 1975: Analisis Kebijakan Luar Negeri pada Level Sistem Internasional, Politik Domestik, dan Individu. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(2), 195-215.
- Australian Politics. (2011). *AUKMIN III Communique*. Retrieved from <https://australianpolitics.com/2011/01/18/aukmin-iii-communicue.html/>
- Beaumont, J. (1996). Australia's war: Europe and the Middle East. In *Australia's War 1939-45*. London: Routledge.
- Beaumont, J. (2014). Unitedly We Have Fought: Imperial Loyalty and the Australian War Effort. *International Affairs*, 90(2), 397-412.
- Beeson, M. (2009). Australia, the United States and the Unassailable Alliance. In J. Dumbrell, & A. Schäfer, *America's 'Special Relationships'*. New York: Routledge.
- Beeson, M., & Bloomfield, A. (2019). The Trump Effect Downunder: U.S. Allies, Australian Strategic Culture, and the Politics of Path Dependence. *Contemporary Security Policy*, 40(3), 335-361.
- Benvenuti, A. (2004). Shifting Priorities: Australia's Defence Ties to Britain in the Aftermath of Empire. *History Compass*, 2(1), 1-11.
- Bisley, N. (2016). *Australia's Strategic Culture and Asia's Changing Regional Order*. The National Bureau of Asian Research.
- Bisley, N. (2019). Australia's American Alliance and the Networking of Forces in East Asia. *International Politics*, 57(2), 208-224.
- Broadberry, S., & Harrison, M. (2005). *The Economics of World War I*. New York: Cambridge University Press.

- Brown, J. (2020). An Analysis of Australian Defense Policy From 1901 to Present. *Security Nexus*, 21, 1-7.
- Candra, D. S. (2013). Dinamika Kerjasama Keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat Sejak Tahun 2000. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(2), 177-194.
- Cheeseman, G. (1991). From Forward Defence to Self-reliance: Changes and Continuities in Australian Defence Policy 1965-90. *Australian Journal of Political Science*, 26(3), 429-445.
- Corben, T., Ashley, T., & Patton, S. (2021). *What is the AUKUS partnership?* Retrieved from <https://www.ussc.edu.au/analysis/explainer-what-is-the-aukus-partnership>
- Crafts, N. (2014). *Walking Wounded: The British Economy in the Aftermath of World War*. Retrieved from Centre for Economic Policy Research: <https://cepr.org/voxeu/columns/walking-wounded-british-economy-aftermath-world-war-i#:~:text=Overall%20there%20were%20important%20adverse,public%20debt%20to%20GDP%20ratio>
- Dean, P. J. (2016). The Alliance, Australia's Strategic Culture and Way of War. In P. J. Dean, S. Frühling, & B. Taylor, *Australia's American Alliance*. Carlton: Melbourne University Press.
- Defence Ministers Australian Government. (2021). *Joint media statement: Australia to pursue nuclear-powered submarines through new trilateral enhanced security partnership*. Retrieved from <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>
- Donovan, D. (2020). *Australia's last brick of nationhood*. Retrieved from ABC News: https://www.abc.net.au/news/2010-12-07/australia27s_last_brick_of_nationhood/41892
- Dupont, A. (1991). *Australia's Threat Perceptions: A Search for Security*. Canberra: Australian National University Strategic and Defence Studies Center.
- Edwards, P. (2015). *Some Strategic Lessons from the "forward Defence" Era*. Australian Strategic Policy Institute.
- Elijah, A. (2006). Australia and the United Kingdom. *The Round Table*, 667-678.
- Fickling, D. (2004). *Australia seen as America's deputy sherrif*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2004/sep/10/indonesia.australia>
- Fitriani, E. (2012). Indonesia dan Australia: Dekat Tapi Jauh. In *Australia dan Negara-negara Pasifik Selatan: Observasi dan Pandangan dari Indonesia*. Depok: UI Press.
- Fitriani, E. (2018). President Joko Widodo's Foreign Policy: Implications for Indonesia-Australia Relations. In T. Lindset, & D. McRae, *Strangers Next Door? Indonesia and Australia in the Asian Century*. HART Publishing.
- Ford, S. B. (2020). The Evolution of the US-Australia Strategic Relationship. In S. McDonald, & A. Tan, *The Future of the United States-Australia Alliance*. London: Routledge.
- Frühling, S. (2014). Australian Defence Policy and the Concept of Self-

- Reliance. *Australian Journal of International Affairs*, 68(5), 531-547.
- Government UK. (2011). *RAF Typhoons fly 7,000 miles for Ex Bersama Lima*. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/news/raf-typhoons-fly-7-000-miles-for-ex-bersama-lima>
- Haider, M. Z. (2014). Australian Strategic Policy Evolution and Future Challenges. *Defence Journal Karachi*, 18(3).
- Hall, I. (2022). AUKUS and Australia-UK Strategic Reconvergence. *The RUSI Journal*, 167-6, 34-42.
- Hall, T. (1980). *Darwin 1942 Australia's Darkest Hour*. London: Routledge.
- Jaknanihan, A. A. (2022). Beyond Inclusion: Explaining China's rejection on the Indo-Pacific Regional Construct. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(1), 35-62.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Kang, J. I., & Im, Y. (2021). Why Does Australia Perceive China as a Threat?: A Constructivist Point of View. *J-Institute*, 6(2), 1-8.
- Kilcullen, D. J. (2007). Australian Statecraft: The Challenge of Aligning Policy with Strategic Culture. *Security Challenges*, 3(4), 45-65.
- Kusumasomantri, A. R. (2018). Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. *Global: Jurnal Poltiik Internasional*, 17(1), 48-80.
- Lim, R. (1998). Australian Security after the Cold War. *Orbis*, 42(1), 91-103.
- Lim, R., & McLennan, A. D. (1996). Self-Reliance as Panacea: Muddling Strategic Thinking in Australia. *A Journal of Policy Analysis and Reform*, 3(3), 267-275.
- McDhougall, D. (2001). Australia and Asia-Pacific Security Regionalism: From Hawke and Keating to Howard. *Contemporary Southeast Asia*, 23(1), 81-100.
- Morton, L. (1961). Britain and Australia in the War against Japan: Review Article. *Pacific Affairs*, 34(2), 184-189.
- Pertiwi, S. B. (2020). Repositioning Indonesia in the Changing Maritime Landscape of the Indo-Pacific Region. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 1-25.
- Saunders, M. J. (1982). The Trade Unions in Australia and Opposition to Vietnam and Conscription: 1965-73. *Labour History*(43), 64-82.
- Scott, D. (2018). Britain Returns to the Indian Ocean? *The Round Table*, 107(3), 307-316.
- Sheridan, G. (2006). *The Partnership: The Inside Story of the US-Australian Alliance under Bush and Howard*. University of New South Wales Press.
- Smith, A. (1995). Alliance Formation and War. *International Studies Quarterly*, 39(4), 402-425.
- Snyder, G. H. (1990). Alliance Theory: A Neorealist First Cut. *Journal of International Affairs*, 44(1), 103-123.
- Tertia, J., & Perwita, A. A. (2018). Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Proscpects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 77-95.

- The White House. (2018). *President Donald J. Trump's Meeting with Australian Prime Minister Malcolm Turnbull Strengthens the United States-Australia Alliance and Close Economic Partnership*. Retrieved from The White House:
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-meeting-australian-prime-minister-malcolm-turnbull-strengthens-united-states-australia-alliance-close-economic-partnership/>
- TheGuardian. (2011). *Obama tells Asia US 'here to stay' as a Pacific power*. Retrieved from The Guardian:
<https://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament>
- Walker, D. (1999). *Anxious Nation: Australia and the Rise of Asia 1850-1939*. St Lucia: University of Queensland Press.